



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA.
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah : **KU-616442**
Nama Mata Kuliah : **Hukum dan Administrasi Perencanaan**
Bobot Mata Kuliah (sks) : **2**
Semester : **4**
Mata Kuliah Prasyarat : **• Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota**

Identitas dan Validasi

Dosen Pengembang RPS
Koord. Kelompok Mata Kuliah
Kepala Program Studi

Nama

Ir. Galing Yudana, MT
Ir. Galing Yudana, MT
Ir. Soedwihajono, MT
Prof. Ir. Winny Astuti, MSc, PhD

Tanda Tangan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL

P1

Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman

P2

Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota

CP Mata kuliah (CPMK)

: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum dan administrasi dalam proses perencanaan. Ketentuan peraturan antara lain hukum tata ruang, hukum sistem perencanaan pembangunan nasional, hukum pertanahan, hukum lingkungan, hukum tentang perumahan dan lingkungan.

Bahan Kajian Keilmuan

: Pengantar Ilmu Hukum dan Perundangan (P1)
Peraturan Perundangan bidang Perencanaan (P2)
Administrasi Perencanaan (P1)

Deskripsi Mata Kuliah

: Merupakan matakuliah dasar yang membahas hukum dan peraturan yang terkait dengan Perencanaan khususnya perencanaan tata ruang termasuk pengertian, jenis, hierarki dan proses penyusunan

Unsur CPL

Daftar Referensi

- :
1. Drs.C.S.T. Kansil,SH. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
 2. UU No.26 Th.2007 Tentang Penataan Ruang
 3. UU No.25 Th.2004 Tentang SPPN
 4. UU Lingkungan Hidup
 5. UU Pokok Agraria

Tahap	Kemampuan akhir	Materi Pokok	Referensi	Metode Pembelajaran		Pengalaman Belajar	Waktu	Penilaian*	
				Luring	Daring			Indikator/ kode CPL	Teknik penilaian /bobot
				5	6				
1.	Menjelaskan Pengertian, latar belakang, tujuan dan konsepsi Ilmu hukum	1. Pengertian, latar belakang, tujuan dan konsepsi Ilmu hukum	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
2.	Menjelaskan Ruang Lingkup Ilmu Hukum sebagai wahana pengendalian	2. Ruang Lingkup Ilmu Hukum sebagai wahana pengendalian	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
3.	Menjelaskan Relevansi ilmu hukum dengan aspek lain yang terkait: politik, ekonomi, sosial, teknik serta budaya;	3. Relevansi ilmu hukum dengan aspek lain yang terkait: politik, ekonomi, sosial, teknik serta budaya;	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
4.	Menjelaskan Pengantar sistem hukum di Indonesia	4. Pengantar sistem hukum di Indonesia	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%

5.	Menjelaskan Sumber-sumber hukum Jenis dan hierarki hukum di Indonesia	5. Sumber-sumber hukum, Jenis dan hierarki hukum di Indonesia	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
6.	Menjelaskan Konsep dasar administrasi perencanaan dan	6. Konsep dasar administrasi perencanaan dan Jenis Perencanaan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
7.	Menjelaskan Perundang-undangan Penataan Ruang dan SPPN	7. Perundang-undangan Penataan Ruang dan SPPN	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman / P1	Tes/ 5%
8.	Tes Tengah Semester	8. UTS	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%
9.	Menjelaskan Prinsip dan azas pembentukan perundang-undangan	9. Prinsip dan azas pembentukan perundang-undangan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ujian Tulis	Sistem Spada	Mengerjakan Ujian Tertulis (UTS)	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%

10	Menjelaskan Bahasa dan Peraturan Perundang-undangan	10. Bahasa dan Peraturan Perundang-undangan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%
11.	Menjelaskan Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	11. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%
12.	Menjelaskan Dasar hukum Perencanaan	12. Dasar hukum Perencanaan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%
13.	Menjelaskan Isi dan Produk Perencanaan	13. Isi dan Produk Perencanaan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Tes /5%
14.	Proses dan Prosedur Administrasi Perencanaan	14. Proses dan Prosedur Administrasi Perencanaan	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Ceramah Diskusi kelas	Sistem Spada	Mendengarkan dan berdiskusi di Kelas	2 x50	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Presentasi / 25%

15.	Menyusun Tugas Makalah tentang Proses legalisasi produk perencanaan salah satu Kabupaten.	15. Pengumpulan Tugas	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5		Sistem Spada			Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Makalah /5%
16.	Ujian akhir Semester	16. Ujian akhir Semester	Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5	Tes uji kemampuan	Sistem Spada	Ujian tertulis (UAS)		Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota / (P2)	Ujian 5%
							32x50		100%

*Kriteria Penilaian terlampir

**Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Sebelas Maret (UNS) berdasarkan Kurikulum Tahun 2016**

No	Kode	Unsur
1	S1	Menunjukkan etika akademis secara profesional berdasarkan Pancasila
2	S2	Menunjukkan semangat kemandirian, kejujuran, kewirausahaan sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku
3	S3	Bertanggungjawab atas pekerjaan perencanaan wilayah dan kota sesuai dengan kode etik perencana dan profesi lain yang menjadi pekerjaannya
4	P1	Memahami konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman
5	P2	Memahami cara penerapan proses administratif dan prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dan kota
6	P3	Memahami kerangka normatif dan substantif produk-produk perencanaan
7	P4	Penguasaan pengetahuan dan penerapan proses analisis dan sintesis dengan bantuan IT, <i>computing</i> dan teknik komunikasi dalam lingkup pekerjaan perencanaan wilayah dan kota
8	KU1	Mampu menerapkan pemikiran rasional dan inovatif, beradaptasi, berkompetisi dan berprestasi dalam menyusun dan menyebarluaskan karya ilmiah
9	KU2	Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim dan bertanggungjawab atas pekerjaan dan pencapaian tim
10	KU3	Mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan secara lisan, tertulis maupun visual dengan beretika.
11	KK1	Mampu mengaplikasikan ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam praktik perencanaan rasional komprehensif untuk membangun wilayah dan kota yang lebih baik berdasarkan penguasaan isu-isu lokal dan pemahaman terhadap etika profesi
12	KK2	Mampu menganalisis isu-isu perencanaan wilayah dan kota pada tataran lokal dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah dan teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan perkembangan paradigma global
13	KK3	Mampu menyusun alternatif kebijakan pengembangan wilayah dan kota untuk menyelesaikan masalah pembangunan berdasarkan inovasi, kreatifitas dan karakteristik lokal.
14	KK4	Menerapkan metode dan teknik perencanaan wilayah dan kota dengan nilai tambah pada perencanaan perumahan dan permukiman
15	KK5	Menerapkan metode dan teknik perencanaan wilayah dan kota dengan pendekatan partisipatif komunitas
16	KK6	Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun bidang lain yang terkait dan/atau memimpin tim dalam lingkup pekerjaan perencanaan wilayah dan kota
17	KK7	Mampu mengenali konteks pekerjaan perencanaan wilayah dan kota dengan beradaptasi dan menjunjung tinggi integritas profesi

Lampiran 2.

RUBRIK PENILAIAN HASIL KAJIAN PENYUSUNAN HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN

Nama :

NIM :

Kategori	8	6	4	2
Pemilihan studi kasus	Pemilihan kasus dengan dasar pertimbangan: 1. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Dasar hukum Perencanaan 3. Isi dan Produk Perencanaan 4. Proses dan Prosedur Administrasi Perencanaan	Pemilihan kasus dengan dasar pertimbangan: 1. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Dasar hukum Perencanaan 3. Isi dan Produk Perencanaan	Pemilihan kasus dengan dasar pertimbangan: 1. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Dasar hukum Perencanaan	Pemilihan kasus dengan dasar pertimbangan: 1. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Pendahuluan	Latar belakang masalah diungkapkan secara komprehensif dan mengarah pada Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan, Isi dan Produk perencanaan, Proses dan Prosedur Administrasi Perencanaan	Latar belakang masalah diungkapkan secara komprehensif dan mengarah pada Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan, Isi dan Produk perencanaan,	Latar belakang masalah diungkapkan secara komprehensif dan mengarah pada Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan	Latar belakang masalah diungkapkan secara komprehensif dan mengarah pada Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan,
Tinjauan teoritik	Tinjauan teoritik diorganisasi dengan konsisten dan lengkap: Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan, Isi dan Produk perencanaan, Proses dan Prosedur Administrasi Perencanaan	Tinjauan teoritik diorganisasi dengan konsisten namun kurang lengkap: Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan, Isi dan Produk perencanaan,	Tinjauan teoritik diorganisasi tanpa mengikuti pola tertentu meskipun tinjauan teoritik memuat Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum Perencanaan.	Tinjauan teoritik tidak cukup mengkaji penelitian yang terdahulu maupun terkini terkait dengan Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan,
Metodologi	Variabel dan teknik sampling dideskripsikan dengan jelas dan lengkap. Instrumentasi dan prosedur penggalan data di lapangan diorganisasi dengan lengkap dan jelas dan diterapkan dengan sesuai untuk menjawab rumusan legalisasi produk perencanaan	Variabel dan teknik sampling kurang jelas dan kurang lengkap. Instrumentasi dan prosedur penggalan data di lapangandiorganisasi dengan lengkap dan jelas dan diterapkan dengan sesuai untuk menjawab rumusan legalisasi produk perencanaan	Variabel dan teknik sampling kurang jelas dan kurang lengkap. Instrumentasi dan prosedur penggalan data di lapangan tidak memuat penjelasan fungsi instrumentasi walaupun sesuai untuk menjawab rumusan legalisasi produk perencanaan.	Variabel dan teknik sampling tidak jelas dan tidak lengkap. Instrumentasi dan prosedur penggalan data di lapangan tidak memuat penjelasan fungsi instrumentasi dan tidak sesuai untuk menjawab rumusan legalisasi produk perencanaan

Jumlah daftar pustaka yang digunakan	≥ 15 referensi merupakan sumber primer dan paling tidak 75% dari keseluruhan referensi, terbitan ≤ 5 tahun dari sekarang	12-14 referensi merupakan sumber primer dan paling tidak 75% dari keseluruhan referensi, terbitan ≤ 5 tahun dari sekarang	9-11 referensi merupakan sumber primer dan paling tidak 75% dari keseluruhan referensi, terbitan ≤ 5 tahun dari sekarang	0-8 referensi merupakan sumber primer dan paling tidak 75% dari keseluruhan referensi, terbitan ≤ 5 tahun dari sekarang
--------------------------------------	--	--	---	--

Lampiran 3.

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI HASIL HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN

Nama :

NIM :

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Skor Maksimum	Penilaian
1	Penyajian	Persiapan	10	
		Urutan materi	15	
		Penggunaan alat bantu/media lain	10	
2	Naskah Presentasi	Kesesuaian dengan proposal/makalah	10	
		Komposisi slide	10	
3	Pemaparan	Penggunaan bahasa baku	15	
		Kejelasan isi presentasi	15	
4	Sikap	Penyampaian materi	10	
		Penampilan	5	
		Total nilai		